

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) STUDI DI
KELURAHAN SUMBER AGUNG KECAMATAN KEMILING KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**FARADIPA
NPM. 1916041024**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) STUDI DI KELURAHAN SUMBER AGUNG KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Faradipa

Perempuan memiliki hal yang penting dalam proses tercapainya kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga akan membantu negara dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di daerah yang tingkat penduduk atau warga miskin nya relatif tinggi. Dengan kata lain bahwa peran aktif perempuan merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk bangkit dari ketertinggalan dan kemiskinan. Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan, dengan demikian perempuan perlu melibatkan diri dan terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator standar dan sasaran sudah jelas, indikator sumber-sumber kebijakan belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber finansial, indikator komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan belum berjalan dengan baik dalam komunikasi melaksanakan program P3KSS, indikator karakteristik-karakteristik agen pelaksana cukup menerima dengan baik adanya program P3KSS, indikator disposisi implementor menerima dengan baik, indikator kondisi ekonomi, sosial, dan politik sudah maksimal dan tidak ada kepentingan politik yang dimanfaatkan.

Kata Kunci: Implementasi, Program P3KSS, Peranan Perempuan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM TO INCREASE THE ROLE OF WOMEN TOWARDS A HEALTHY PROSPEROUS FAMILY (P3KSS) STUDY IN SUMBER AGUNG URBAN VILLAGE, KEMILING SUB-DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY

By

Faradipa

Women have an important role in the process of achieving family prosperity. Increasing family welfare will help the country reduce poverty levels, especially in areas where the level of population or poor people is relatively high. In other words, women's active role is one of the keys to success in rising from backwardness and poverty. The Increasing Women's Role Program towards Healthy and Prosperous Families (P3KSS) has become one of the government's efforts to increase women's role in development, thus women need to involve themselves and be involved in every stage of development. This research uses a descriptive method with a qualitative approach obtained using interviews, observation and documentation. This research shows that standard indicators and targets are clear, indicators of policy resources have not been maximized due to limited financial resources, indicators of communication between related organizations and activities have not gone well in communication implementing the P3KSS program, indicators of the characteristics of implementing agents are sufficient accept the P3KSS program well, implementor disposition indicators accept it well, indicators of economic, social and political conditions are optimal and no political interests are exploited.

Keywords: Implementation, P3KSS Program, Women's Role

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) STUDI DI
KELURAHAN SUMBER AGUNG KECAMATAN KEMILING KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

FARADIPA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA
SEHAT SEJAHTERA (P3KSS) STUDI DI
KELURAHAN SUMBER AGUNG
KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Faradipa

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916041024

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M. Si.
NIP. 19720918 200212 2 002

Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. AP.
NIP. 19830815 201012 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M. Si.

Sekretaris : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. AP.

Penguji : Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph. D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M. Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 Juni 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 05 Juni 2024

Yang Menyatakan,


Faradipa

NPM. 1916041024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Faradipa, lahir di Bogor, 16 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hairi dan Ibu Lelawati serta memiliki adik laki-laki yang bernama Yusuf Ardiansyah. Penulis menempuh jenjang Pendidikan di TK An-nissa yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 02 Gunung Putri yang diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan SMP di Pondok Pesantren Yapida yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke MA di Pondok Pesantren Yapida yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui SBMPTN. Penulis mengikuti kepengurusan di organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara). Pada periode Januari - Februari 2022 penulis melaksanakan KKN di Kelurahan Cipanas, Kecamatan Cibodas, Bogor selama 40 hari. Setelah itu, penulis mengikuti Program Magang Merdeka pada bulan Maret - Agustus 2022 selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terima kasih yang tulus.

kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Mamah Tersayang
Bapak Hairi dan Mamah Lelawati

Terimakasih atas doa yang bapak dan Mamah panjatkan disetiap sujud, dukungan, perjuangan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dari bapak dan mamah untuk saya. Segala pencapaian ini kupersembahkan untuk kalian sebagai langkah awal untuk membanggakan dan membahagiakan kalian.

Adekku Tersayang
Yusuf Ardiansyah

Terima kasih atas segala doa, usaha dan motivasi yang telah diberikan kepada atukmu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membuat bapak dan mamah bangga.

Para Pendidik Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Terima kasih sudah membimbing dengan penuh ketulusan dan memberikan bekal ilmu serta pesan moral yang bermanfaat. Pengalaman berharga ini tidak akan saya lupakan.

Serta
Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah”

(Joko Widodo)

SANWACANA



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Studi di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, saran dan masukan yang ibu berikan kepada saya. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran untuk saya. Semoga ibu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah

SWT, aamiin.

4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP.,M.AP. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih untuk segala ilmu, bimbingan, saran dan masukan yang ibu berikan kepada saya. Segala masukan yang ibu berikan menjadi tambahan wawasan dan pelajaran untuk saya. Semoga ibu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT, aamiin.
5. Miss Intan Fitri Meutia, S. A. N., M.A., Ph. D. selaku Dosen Penguji, terima kasih miss untuk kesediaannya memberikan masukan skripsi saya dari seminar proposal hingga skripsi ini selesai, Semoga miss diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu oleh Allah SWT, aamiin.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar para mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya bagi saya dan mahasiswa lainnya.
7. Seluruh Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai administrasi..
8. Bapak dan Mamahku tersayang, terima kasih banyak atas doa yang selalu dipanjatkan, serta tiada hentinya memberikan semangat, kasih sayang, kerja keras, pengorbanan, dukungan dan restu disetiap langkahku. Terimakasih atas kesabaran yang tak terhingga dan tidak menuntut anak untuk lulus tepat waktu. Semoga bapak dan mamah diberikan umur panjang dan sehat selalu agar terus menemani disetiap perjalanan dan pencapaianku. Semoga anakmu bisa membalas kebaikan kalian, membahagiakan serta mengangkat derajat orangtua dan keluarga, aamiin.
9. Adekku tersayang, terima kasih sudah menjadi adik laki-laki yang baik, selalu memberikan dukungan, bantuan semangatnya serta selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh keluarga besar, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kasih sayang, mendoakan dan mendukung saya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. aamiin.
11. Bapak dan ibu Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, terima kasih sudah menerima dalam melaksanakan

kegiatan magang. Tak lupa juga teman-teman magangku Rofiq, Ayyas, Amal, Agustina, Alif, Anin dan Ivan, terima kasih sudah berproses bersama selama 6 bulan.

12. Teman-teman “Pasukan Elite W” Mba Egi, Anin, Kezia, Amal, Nanda, dan Ayu. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, selalu mendukung, bersedia mendengar semua keluhan dan memberikan semangat kepada penulis. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih karena ambisius kalian penulis ikut ambis menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak tepat waktu.
13. Teman-teman kuliah Rofiq, Junia, Putri, Marfu’ah, Dinda, Amal, Laila, Nina, Anada, Jono, Iqbal, Adit dan lain-lain. Terima kasih sudah hadir menjadi peserta seminar selama proses skripsi.
14. Terutama pada pasanganku inisial “R” yang selalu menemaniku dari awal skripsi hingga akhir skripsi, walaupun panas, hujan tetap memberikan tenaganya hingga rasa pedulinya.
15. Teman-teman angkatan GRANADA terutama kelas Reguler B, terima kasih untuk setiap kenangan dan kebersamaan yang kita lalui selama 4 tahun ini. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa reunion ya nanti.
16. Terakhir untuk diriku sendiri, terima kasih sudah mau memulai, melanjutkan dan menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Tidak mudah untuk bisa berjalan dan bertahan sampai sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena selalu berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap proses hingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Juni 2024

Faradipa

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penlitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	12
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik	15
2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Perempuan	22
2.5 Tinjauan Tentang Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)	227
2.6 Kerangka Berpikir	30
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.7 Teknik Keabsahan Data	41
IVHASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	44

4.1.2 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.....	46
4.1.3 Profil Kecamatan Kemiling.....	49
4.1.4 Profil Kelurahan Sumber Agung.....	50
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling	56
4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling	81
4.3 Pembahasan Penelitian	83
4.3.1 Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling	83
4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling	98
V. Kesimpulan dan Saran	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indikator-Indikator Keberhasilan Program P3KSS.....	2
2. Data Penghasilan Penduduk Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling..	4
3. Kajian Perbandingan Penelitian	8
4. Data Informan	32
5. Dokumentasi	33
6. Struktur Organisasi Pamong Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling	38
7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	40
8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	42
9. Indikator keberhasilan Program P3KSS yang Telah Terealisasi	80
10. Agen pelaksana Program P3KSS	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	26
2. Komponen Analisis Data	34
3. Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	42
4. Struktur Organisasi Pamong Kelurahan Sumber	45
5. Surat Keputusan Gubernur Lampung Penetapan Lokasi Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	52
6. Bibit daun kelor	55
7. Pengelolaan daun kelor oleh warga binaan	55
8. Hasil produk warga binaan berupa kripik daun & tenteng jahe	56
9. Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dengan Implementor P3KSS di Kelurahan Sumber Agung	60
10 Kegiatan Sosialisasi oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan Koordinator Kecamatan Kemiling ke Kelurahan Sumber Agung	63
11.Dokumentasi Petunjuk Teknis Penilaian Keberhasilan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Di Provinsi Lampung Tahun 2022	66
12. Dokumentasi Pelatihan Kader dalam Pemberian Berbagai Materi	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi dan posisi keluarga di Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari segi kualitas maupun berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar di Indonesia memiliki kualitas perkembangan dan pembangunan keluarga yang harus melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik, kondisi ini diperparah dengan situasi setelah pandemi covid-19, oleh karenanya Indonesia harus memahami tentang kewajiban untuk memberikan jaminan dalam perkembangan dan pembangunan penduduk dan keluarga. Adapun tertuang dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sehat sejahtera dilakukan berdasarkan asas yang dimaksud dalam Pasal 1 Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sehat sejahtera.

Adapun program yang telah di buat pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu percepatan pembangunan bangsa kedepannya, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 41/Kep/Meneg.pp/viii/2007/Tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Untuk mendukung keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Daerah. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan ini dengan tujuan bahwa dirasa perlu adanya peningkatan peranan perempuan di daerah dilaksanakan dengan terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program P3KSS tersebut menegaskan bahwa program P3KSS merupakan program yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat desa atau kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerakannya. Selain untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah, namun juga akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.

Adapun indikator-indikator untuk mencapai keberhasilan program tersebut diantaranya:

Tabel 1. Indikator-Indikator Keberhasilan Program P3KSS

No	Indikator	Kegiatan
1	Kelembagaan	a. Struktur P3KSS b. Pembagian Kelompok Binaan c. Penganggaran (Bantuan antara pemerintah dan swadaya)
2	Pemberantasan Buta Huruf Dalam Arti Luas	a. Membaca dan Menulis Latin b. Perubahan Sikap Mental
3	Penyuluhan Kepada Pedagang Kecil/Ekonomi Lemah	a. Penataran b. Sosialisasi c. Membina kelangsungan kegiatan usaha
4	Peningkatkan keterampilan perempuan di bidang industri kecil/ industri rumah tangga atau kewirausahaan	a. Latihan berbagai jenis keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga b. Pemberian alat-alat pembinaan kelompok usaha c. Peningkatan mutu dan promosi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1, menjabarkan terkait indikator-indikator keberhasilan program Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) yaitu terdapat kelembagaan, pemberantas buta huruf, penyuluhan kepada pedagang kecil atau ekonomi lemah dan Peningkatan keterampilan perempuan di bidang industri kecil atau industri rumah tangga atau kewirausahaan dari beberapa indikator tersebut terdapat kegiatan untuk:

1. Meningkatkan peranan perempuan dalam pembentukan karakter keluarga, melalui peningkatan pemahaman keluarga sehat sejahtera.
2. Meningkatkan peranan perempuan dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan keluarga, melalui pelatihan-pelatihan ekonomi produktif dan kreatif.
3. Terhindarnya keluarga dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahaya narkoba, aksi pornografi dan porno aksi.
4. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok perempuan atau ibu-ibu dalam rangka peningkatan pemahaman, keterampilan guna peningkatan pendapatan keluarga.

Dalam mensukseskan program P3KSS ini telah dilakukan berbagai upaya secara bertahap dan terpadu oleh instansi yang terkait dengan peran bantu yaitu tim penggerak PKK. Pencapaian pada program P3KSS ini belum mencapai tujuan yang maksimal, terdapat beberapa keluarga binaan khususnya di bidang ekonomi yang disebabkan oleh banyaknya dari keluarga binaan bekerja sebagai petani penggarap, buruh harian sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan keluarga untuk dapat merubah keadaan ekonomi rumah tangga lebih baik. Adapun berdasarkan data penghasilan penduduk kelurahan sumber agung kecamatan kemiling menurut mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penghasilan Penduduk Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

No	Jenis Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah Orang 2022
1	Karyawan Swasta	46
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	38
3	ABRI/Polisi	7
4	Wiraswasta Pedagang	407
5	Tani	218
6	Pertukangan	154
7	Buruh Tani	504
8	Pensiunan	11

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 2, menjabarkan bahwa Data penghasilan penduduk kelurahan sumber agung kecamatan Kemiling. Masih banyaknya mata pencaharian penduduk yang seperti butuh tani, wiraswasta pedagang dan petani. Hal tersebut menandakan bahwa masih banyaknya penduduk kelurahan sumber agung kecamatan Kemiling belum memiliki pendapatan yang cukup.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Murdiansyah (2014) masalah kemiskinan menyangkut dengan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan maka perlu adanya penguatan peran gender yang melibatkan peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan perempuan tercantum dalam tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai. Tujuan MDGs tersebut antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan untuk semua, mendorong kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS serta penyakit menular, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global.

Menurut Saptandari (2012) salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pemberdayaan perempuan supaya dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Hubeis dalam Wildan Saugi dan Sumarno (2015) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan suatu perbaikan upaya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas hidup kaum perempuan berbagai sektor bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan dan kesehatan.

Menurut Parawansa (2006) pemberdayaan perempuan adalah usaha perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya. Adanya pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi perempuan sehingga dapat menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, membantu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga dan lain sebagainya.

Permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan P3KSS terjadi karena kurangnya komunikasi antar implementor dengan warga binaan dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya sumber daya finansial dalam proses pelaksanaan program P3KSS. Program P3KSS yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan jika kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik (Linawati, 2016)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Studi di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersedia, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan ketercapaian implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

1. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi bagi pemerintah dalam proses implementasi program P3KSS, dan

menjadi bahan pertimbangan dalam menuju keluarga sehat sejahtera, khususnya di Kelurahan Sumber Agung.

2. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan informasi terkait implementasi kebijakan, khususnya pada implementasi program P3KSS, serta dapat menjadi bahan referensi untuk yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat tema tentang implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS). Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan ini, Peneliti mengambil 3 hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lainnya yang dapat mempermudah mengidentifikasi masalah ataupun kajian teori yang nantinya akan digunakan oleh peneliti, sebagai berikut :

Tabel 3. Kajian Perbandingan Penelitian

	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi /Persamaan
Penelitian Pertama	Rezza Widia Utami (2022)	Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di kelurahan kepuh	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi pemberdayaan perempuan melalui program P2WKSS di Desa Cikendat Kelurahan Kepuh, Ciwandan, Cilegon berjalan dengan baik, dibuktikan dengan hasil penilaian evaluasi program. Program P2WKSS ini berhasil karena sesuai dengan harapan yaitu	Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada teori yang dipakai oleh penelitian Rezza Widia Utami menggunakan teori sosiologi pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan. Serta

			perempuan Desa Cikendat memiliki kompetensi diri dengan meningkatkan kondisi sosial dan partisipasi serta perempuan memiliki kesadaran akan potensi yang dimilikinya.	lokasi penelitian di kelurahan kepuh sedangkan peneliti di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling
Penelitian Kedua	Andi Maulana Yusuf (2022)	Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera di desa kertarahayu kecamatan satu kabupaten bekasi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) telah berjalan dengan baik dalam pembentukan keluarga sejahtera di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, beberapa hambatan dapat teratasi karena kerjasama yang baik antar pihak terkait. Implementasi Program P2WKSS di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi	Penelitian ini perbedaan yang terletak pada teori yang dipakai oleh penelitian menggunakan teori implementasi dari Charles Ojones sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan. Serta lokasi penelitian di kecamatan satu kabupaten bekasi sedangkan peneliti di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling

telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terbentuknya keluarga sejahtera dan telah terlaksana sesuai dengan teori, meskipun sempat mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian Ketiga	Khaerul Umam Noer (2021)	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Miskin Melalui Program P2WKSS di Kota Bekasi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan bagi ibu rumah tangga prasejahtera melalui program terpadu P2WKSS telah dilakukan sesuai dengan 7 tahapan pemberdayaan. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dinas-dinas terkait telah berupaya memberikan keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga prasejahtera dengan baik. Dari mulai tahapan persiapan hingga terminasi dilakukan	Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada teori yang dipakai oleh penelitian menggunakan metode participatory Action sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Serta lokasi penelitian di kota bekasi sedangkan peneliti di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling
-------------------	--------------------------	---	---	--

dengan maksimal. Pada tahapan awal kegiatan P2WKSS lebih memfokuskan pada koordinasi dan persiapan bersama seluruh dinas, stakeholder dan pihak terkait. Pada tahapan pelaksanaan, ibu-ibu rumah tangga mulai dilibatkan secara langsung. Serta dalam pemantauan dan evaluasi mulai dilakukan pada saat program sedang berjalan dan saat program telah selesai.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) dipergunakan untuk merujuk kepada perilaku seorang aktor pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Andi C.N dan M. Guntur, 2019). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan memiliki arti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, kebijakan bersifat

mendasar karena hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 107:2).

Dalam bahasa Inggris, kebijakan publik disebut dengan istilah *public policy*. Di mana dalam *Black Law Dictionary*, kebijakan publik didefinisikan sebagai, “*Principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society* (standar-standar yang dibentuk oleh badan legislatif atau oleh pengadilan sebagai suatu pedoman mendasar bagi negara dan seluruh masyarakat) (Bryan A. Garner, 2009:1348). Namun, definisi ini masih dirasa kurang menyeluruh dalam mengakomodir seluruh organ pemerintahan yang berwenang membuat suatu kebijakan, karena dalam praktik pembentukan kebijakan di suatu negara, kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam pembentukan kebijakan publik dibanding legislatif atau pengadilan, justru lebih sering (Hermanto Suaib et al., 2022:7-8). Oleh sebab itu, definisi yang relevan untuk digunakan adalah “*relating or belonging to an entire community, state, or nation*” untuk merujuk pada “*public*”, sedangkan “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs*” merujuk pada “*policy*”. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dinyatakan sebagai suatu standar dan prinsip yang pemerintah gunakan untuk mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara (Hermanto Suaib et al., 2022).

Menurut Friedrich (1963) dalam Hamdi (2014) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan terkait pemerintah, kelompok, atau perorangan dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan ataupun kesempatan yang akan ditangani atau dimanfaatkan lewat kebijakan yang direkomendasikan dalam usaha mewujudkan suatu maksud atau

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut James Anderson (1979) dalam Mustari (2015) berpendapat bahwa kebijakan dapat dipergunakan dalam menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya suatu lembaga pemerintah, seorang pejabat, maupun suatu kelompok) atau beberapa aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai kebijakan publik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang berisi peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut James Anderson (1979) dalam Subarsono (2022) sebagai berikut.

1. Formulasi Masalah (*problem formulation*) Formulasi masalah yaitu suatu proses pencarian masalah, dan mencari tahu apa yang membuat hal tersebut menjadi suatu masalah kebijakan. Formulasi masalah ini merupakan tahapan penting dalam mengidentifikasi bagaimana suatu masalah tersebut dapat diangkat menjadi agenda pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan (*formulation*) Formulasi kebijakan merupakan suatu proses dalam mengembangkan alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan untuk dapat memecahkan suatu masalah, dan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.
3. Penentuan Kebijakan (*adoption*) Proses penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu alternatif dapat ditetapkan, dan mengetahui persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu tahapan penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui siapa yang akan melaksanakan

kebijakan, dan bagaimana tahapan atau strategi dalam melaksanakan kebijakan, serta mengetahui isi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Implementasi (*implementation*) Implementasi bertujuan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, dan mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Selain itu dengan adanya implementasi kebijakan maka akan diketahui bagaimana dampak dari isi kebijakan.
5. Evaluasi (*evaluation*) Evaluasi yaitu suatu proses penilaian tingkat keberhasilan atau dampak dari suatu kebijakan. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan mengetahui apakah ada tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Berdasarkan dari proses kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh James Anderson (1979) maka yang menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan, mengetahui siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan apa yang mereka lakukan, serta mengetahui dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap implementasi dapat menentukan apakah suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat diaplikasikan dengan benar di lapangan dan mampu menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Dalam upaya mewujudkan *output* dan *outcomes* yang telah ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan (Sasmito & Nawangsari, 2019).

Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan setelah kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya proses implementasi maka suatu kebijakan yang sudah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Karena hal tersebut proses implementasi kebijakan menjadi proses yang penting di dalam kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah akan menjadi impian atau rancana yang bagus, yang hanya tersimpan rapi dalam arsip kalau kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu proses implementasi kebijakan harus dilakukan dengan bersifat situasional, dan mengacu pada wawasan pemberdayaan dan semangat kompetensi (Ibrahim, 2022).

Menurut Syauckani (2004) dalam Dzulkarnain et al., (2022) implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang telah dirancang untuk dapat mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada publik sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian kegiatan tersebut meliputi: (1) proses pengembangan seperangkat peraturan secara lebih lanjut sebagai bentuk interpretasi kebijakan (2) menyediakan sumber daya agar dapat mendorong kegiatan implementasi, termasuk sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta melakukan identifikasi terhadap siapa yang akan bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan (3) bagaimana cara menyampaikan kearifan yang konkrit kepada publik. Selain itu menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Dzulkarnain et al., (2022) proses implementasi merupakan suatu arah yang diambil oleh kelompok atau individu dalam mencapai suatu tujuan ketika berada dalam proses pelaksanaan kebijakan, dan pastinya dalam melaksanakan suatu kebijakan harus berlandaskan dengan peraturan.

Dalam proses implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan *top down* dan

pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas yakni pemerintah, dalam keadaan ini sering ditemukan proses perumusan kebijakan yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan, karena hal tersebut tidak jarang suatu kebijakan yang memakai pendekatan ini cenderung gagal dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan pendekatan *bottom up* yakni suatu proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah, hal tersebut berarti segala permasalahan yang ada dalam masyarakat selanjutnya dibahas oleh pemerintah agar dapat mencari solusi alternatif kebijakan yang sesuai, biasanya dengan menggunakan pendekatan ini kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah cenderung efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mahardhani, 2018).

Program peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) menggunakan pendekatan *bottom up* karena program ini dimulai dari bawah dengan melihat adanya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemiskinan tersebut kemudian dibahas oleh pemerintah dan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut yaitu dengan menerapkan kebijakan peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2009. Selain itu P3KSS juga melibatkan kelompok sasarannya mulai dari awal proses sampai ke-tahap implementasi kebijakan.

2.3.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi mempunyai beberapa macam model yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut adalah beberapa pendekatan implementasi menurut beberapa ahli.

1. Pendekatan Implementasi Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) pendekatan implementasi mempunyai enam indikator yang mempengaruhi kinerja, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan (2) sumberdaya (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas (4) karakteristik agen pelaksana (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik (6) disposisi implementor.

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mempengaruhi kinerja menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) yaitu sebagai berikut:

- a) Standar dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus dapat terukur dan jelas sehingga dapat direalisasikan. Apabila sasaran dan standar kebijakan kabur, maka akan menimbulkan multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- b) Sumberdaya Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia *human resources* maupun sumber daya non-manusia *non-human resources*. Dalam beberapa kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengamanan Sosial (JPS) yang diperuntukan untuk keluarga miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas implementor.
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas Sebuah program memerlukan koordinasi dan dukungan dari instansi lain. Karena hal tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi untuk mencapai keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik agen pelaksana Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan norma-norma,

yang semuanya itu dapat mempengaruhi implementasi suatu program.

- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan yaitu menolak atau mendukung bagaimana sifat dari opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung dalam proses implementasi kebijakan.
 - f) Disposisi implementor, disposisi implementor mencakup Keberhasilan suatu implementasi kebijakan akan ditentukan dengan sikap pelaksana kebijakan tersebut apakah kebijakan tersebut mendapatkan penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan (implementor). Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan para aktor pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, berbagai tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan tersebut. Pemahaman para pelaksana mengenai tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan menjadi hal yang penting. Jika implementasi suatu kebijakan ingin berhasil diimplementasikan maka harus ada kesadaran dari para pelaksana kebijakan.
2. Pendekatan Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
- Menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2022) terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) (2) karakteristik Kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)

(3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

3. Pendekatan Implementasi Marille S. Grindle

Pendekatan implementasi menurut Grindle (1980) dalam Subianto (2020) adalah suatu model konseptual dan kerangka pemikiran implementasi sebagai proses administrasi dan proses politik. Kerangka pemikiran yang dimaksud di atas disusun dari dua pertanyaan pokok. Pertanyaan pertama membahas tentang “*Content*” atau isi dari program. Pengaruh bisa terjadi dikarenakan isi dari program terhadap proses implementasi. Pertanyaan kedua yaitu membahas tentang “*Context*” (Kondisi Lingkungan) yang memiliki hubungan atau kaitan pengaruh terhadap proses implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua variabel, variabel pertama yaitu isi kebijakan (*Content variable*), dan variabel kedua yaitu konteks kebijakan (*Context variable*). Adapun penjelasan mengenai isi dan konteks kebijakan menurut Grindle sebagai berikut.

Variabel isi kebijakan terdapat enam unsur, yaitu:

- a) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*Interest affected*). Kebijakan yang telah dibuat dapat membawa pengaruh terhadap proses politik yang di “stimuli” dari kegiatan perumusan kebijakan.
- b) Manfaat yang diperoleh (*Type of benefits*).
Program yang memberikan manfaat kolektif akan lebih mudah dalam proses implementasinya. Program yang hanya memberikan manfaat dan bisa dibagi habis yang bersifat khusus bisa mempertajam konflik.
- c) Jangkauan yang diharapkan (*Exstent of change envisioned*) Program yang berlangsung dalam jangka

Panjang, dan menuntut perubahan pelaku, akan cenderung sulit dalam implementasinya.

- d) Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*)
Semakin tersebar implementor (secara organisasi, dan geografis), maka akan semakin sulit program tersebut diimplementasikan.
- e) Pelaksana program (*Program implementor*)
Kualitas dari pelaksana program dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementasi.
- f) Sumber-sumber yang dapat dialokasikan (*Resources comitted*). Ketersediaan sumber daya yang memadai mampu mendukung implementasi suatu program.

Dari beberapa pendekatan implementasi menurut para ahli di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa model-model yang dikemukakan oleh para ahli, mempunyai fokus yang hampir sama, akan tetapi setiap model menurut para ahli memiliki beberapa faktor yang menonjol, hal tersebut dikarenakan setiap model implementasi mempunyai indikator tersendiri sesuai dengan lingkungan kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022). Hal tersebut dikarenakan teori Van Meter dan Van Horn sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana terdapat enam indikator yang dapat membantu menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling yang sesuai dengan kerangka pikir yang telah dibuat.

2.3.3 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut pandangan Sunggono dalam Aviandani et al., (2022) terdapat empat faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1) Isi kebijakan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu dikarenakan masih samarnya isi dari kebijakan tersebut, kebijakan yang terlalu umum, dan tujuan yang tidak terperinci. Selain itu kegagalan juga terjadi karena kurangnya ketetapan internal ataupun eksternal dari kebijakan yang dilaksanakan, dan masih kurangnya sumber daya yang tersedia misalnya dana atau biaya, waktu, serta tenaga manusia.

2) Informasi

Jika setiap implementor tidak mendapatkan informasi dengan baik, maka dipastikan telah terjadi miskomunikasi di dalam birokrasi tersebut

3) Dukungan Implementasi kebijakan publik akan sulit terealisasi jika kurang mendapatkan dukungan dari publik

4) Pembagian potensi Pembagian potensi berkaitan dengan perbedaan wewenang dan tugas dari organisasi pelaksana. Ketimpangan akan terjadi didalam struktur organisasi, jika adanya pembatasan wewenang yang kurang jelas ataupun pembagian tanggung jawab dan tugas kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu.

2.4 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Perempuan

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Suharto (2006) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan suatu proses dan supaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu kepada masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.4.2 Pengertian Perempuan

Sebagai perempuan seseorang tentu kerap dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Kadang cewek, kadang perempuan, dan yang paling terdengar elegan adalah wanita. Perbedaan makna perempuan dan wanita akan dibahas lebih lanjut, berikut beberapa penjelasannya antara lain:

- a. Makna Etimologis Kata wanita berasal dari kata frasa “Wani Ditoto” atau berarti diatur dalam etimologi jawa. Sebutan wanita dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh pada lakilaki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah jawa pada masa tersebut. Sementara itu, menurut bahasa Sansekerta, kata perempuan muncul dari kata empu-an. „per” memiliki makna makhluk dan „Empu” artinya mulia, atau mahir, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia atau memiliki kemampuan.
- b. Pengertian dalam Kamus Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perempuan bermakna seperti;
 - 1) Orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat mentruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui wanita.
 - 2) Istri yaitu bininya sedang hamil
 - 3) Betina (khusus untuk hewan)

- 4) Kata wanita bermakna perempuan dewasa, yaitu kaum-kaum putri (dewasa).

Pengertian kata wanita menurut Kamus Kuno Jawa-Inggris dahulu bermakna „yang diinginkan“ dalam hal ini perempuan dianggap sebagai objek, sesuatu yang diinginkan oleh pria. Sebaliknya kata perempuan menurut KBBI di tahun 1988 justru bermakna “kehormatan sebagai perempuan”

c. Perubahan Makna

Kata wanita ternyata mengalami proses perubahan makna yang semakin positif, sebutan tersebut merupakan bentuk halus dari kata perempuan. Sebaliknya, kata perempuan justru mengalami penurunan di mata masyarakat. Ini sebabnya nama lembaga yang ada adalah “Komnas Perempuan” dan bukan “Komnas Wanita”, atau nama kementerian yang melindungi kesejahteraan perempuan adalah kementerian Pemberdayaan Perempuan dan bukannya Kementerian Pemberdayaan Wanita

2.4.3 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender

Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan,

mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan universal menurut Aritonang (2000)

Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Menurut Aritonang pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber dan struktur atau jalur yang menunjang.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan cara membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal

Menurut Suparjan (2003) kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami esensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang

tepat untuk pemberdayaan. Soenyoto Usman mendefenisikan peran sebagai sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlukan dan ditempatkan dalam masyarakat. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, perempuan Indonesia memiliki peranan dan kedudukannyang sangat penting. Kiprah perempuan diatas panggung sejarah tidak diragukan lagi. Mulai dari tahun 1879 yang dipelopori seorang pejuang perempuan, yaitu Raden Ajeng (R.A.) Kartini, pasca kebangkitan nasional dimana perjuangan perempuan semakin terorganisir, setelah kemerdekaan dimana organisasi perempuan kembali bergerak, dan pada decade akhir pemerintahan Orde Baru yang mulai memunculkan isu gender sehingga disadari bahwa perempuan harus diperdayakan, sehingga sampai pada keadaan perempuan masa kini dimana perempuan telah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya. Fenomena ini dapat dibuktikan dengan eksistensi perempuan dalam organisasi wanita mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan. Berbagai organisasi wanita secara structural diantaranya adalah Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasawisma dan lain sebagainya.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (transformation action) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Karl, 1995). Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi (Sadli, 1991). Pendapatan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri. Penelitian terhadap perempuan diperdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan dengan

berpenghasilan sendiri perempuan menjadi sangat mandiri sehingga berani perempuan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung

2.5 Tinjauan Tentang Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)

2.5.1 Program Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)

P3KSS adalah program yang berlandaskan adanya isu kesetaraan gender. Program ini berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan yang berdampak kepada pembangunan yang adil dan setara gender. Bentuk dari program P3KSS ini adalah pemberdayaan yaitu proses yang dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi berdaya dan meningkatkan potensi serta kemampuan yang dimiliki sehingga menjadi mandiri dan mampu untuk membuat keputusan sendiri untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Pembinaan P3KSS ditujukan kepada 100 perempuan warga binaan dari kampung yang tertinggal. Program P3KSS secara sederhana dapat dijelaskan sebagai kegiatan dimana tim pembina yang terdiri dari berbagai Dinas/Instansi turun langsung kelapangan dan bertemu serta mendengarkan berbagai persoalan perempuan yang dihadapi oleh warga binaan. Kemudian

diadakan diskusi bersama-sama untuk mencari jalan keluar dan memotivasi warga untuk meningkatkan peran perempuan dalam menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.

Program Terpadu P3KSS merupakan salah satu program peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan, yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat desa atau kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerakannya. Kegiatan penilaian ini merupakan hasil dari pembinaan Tim Daerah dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perempuan di suatu Desa atau Kelurahan

2.5.2 Tujuan Program Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)

Tujuan dari program P3KSS yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan status pendidikan perempuan
- 2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku positif keluarga dan perempuan khususnya di berbagai bidang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap anak dan remaja
- 4) Meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan keluarga
- 5) Meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan hidup
- 6) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara
- 7) Memberdayakan kaum lansia

8) Meningkatkan perekonomian lokal

2.5.3 Alur Pelaksanaan P3KSS

Mengacu pada pedoman pelaksanaan P3KSS 2022, proses pelaksanaan P3KSS meliputi beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu:

1) Perencanaan

Proses perencanaan ini dilaksanakan untuk menentukan lokasi P3KSS. Lokasi tersebut berasal dari usulan setiap dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten atau kota yang diajukan ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi.

2) Pengelompokan

Warga binaan yang terdiri dari 100 (seratus) orang, yang dikelompokkan menjadi 10 kelompok berdasarkan potensi dan minat yang sama. Setiap kelompok mendapatkan pelatihan secara rutin serta mendapatkan pendampingan dalam berbagai kegiatan kelompok.

3) Pertemuan awal dan Validasi

Pendamping sosial P3KSS melakukan proses sosialisasi dalam Pertemuan Awal (PA) untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang P3KSS

4) Pelatihan

Kelompok-kelompok warga binaan juga memperoleh pelatihan tentang minat dan bakat dari masing-masing kelompok. Pelatihan tersebut difokuskan pada kemampuan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

5) Rapat Persiapan Tim Penilai Pelaksanaan Lomba

6) Penilaian Kader

7) Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memilih dan menghasilkan calon pemenang lomba dari kelompok-kelompok yang sudah terbentuk.

8) Penyerahan Hadiah

9) Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan terhadap kelompok tetapi juga berfokus pada penghasilan dari setiap kegiatan kelompok untuk meningkatkan pendapatan.

2.6 Kerangka Berpikir

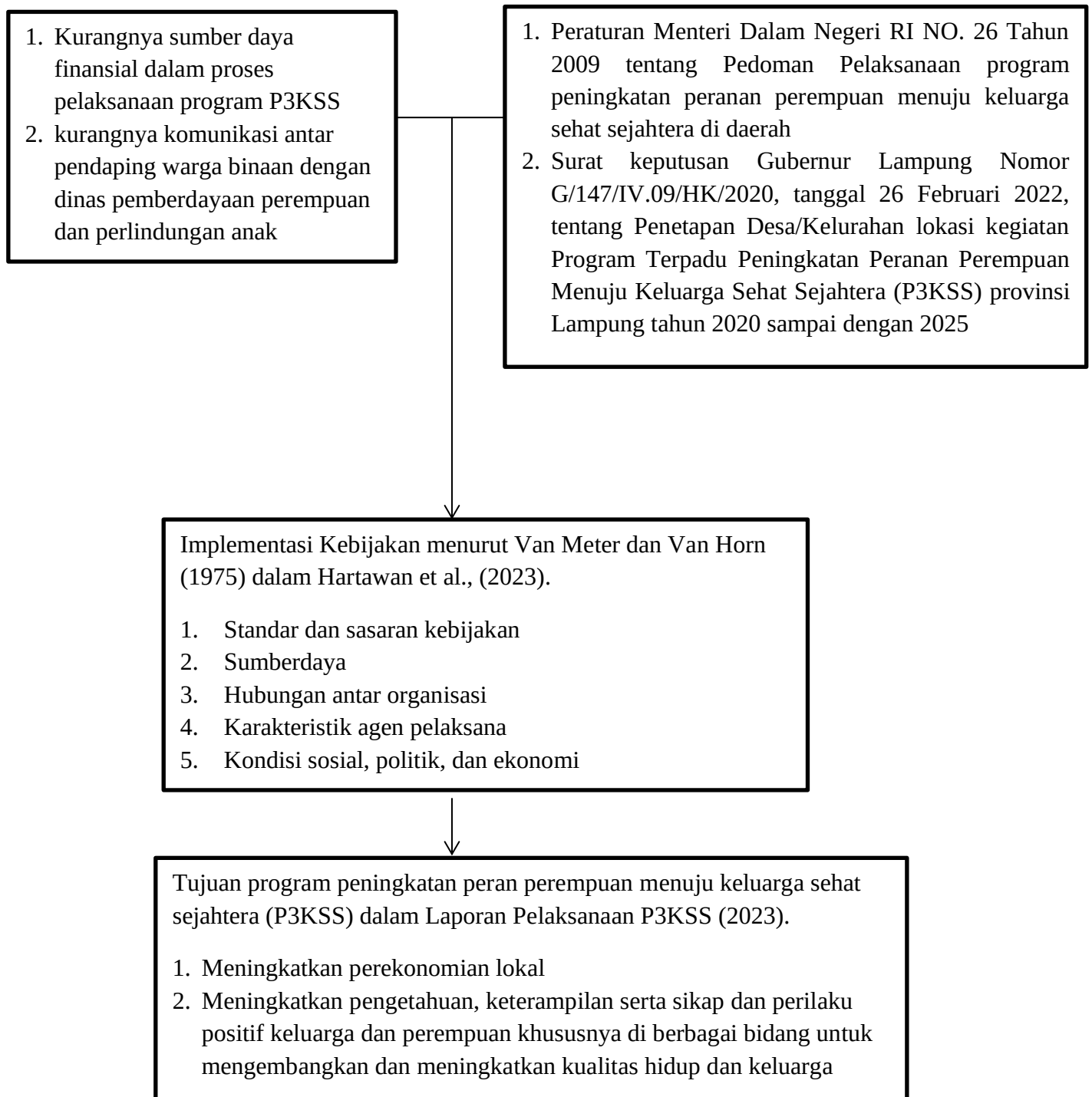
Pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Melihat kondisi perempuan di Indonesia ini dengan segudang permasalahannya adalah sebuah ironi pahit yang harus kita hadapi bersama. Permasalahan-permasalahan tersebut menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Salah satu dengan membuat program peningkatan peran perempuan menuju keluarga yang sehat sejahtera (P3KSS).

Adapun program yang telah di buat pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu percepatan pembangunan bangsa kedepannya, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 41/Kep/Meneg.pp/viii/2007/Tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Dalam proses implementasi P3KSS di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling ditemui beberapa hambatan, adapun hambatan tersebut yaitu Kurangnya sumber daya finansial dalam proses pelaksanaan program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling dan kurangnya komunikasi antar pendamping warga binaan dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada hakikatnya kebijakan P3KSS yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapatkan hasil sesuai tujuan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

Beberapa fenomena di atas terjadi karena proses implementasi tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi P3KSS di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling. Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn terdapat beberapa proses yang mempengaruhi kebijakan, diantaranya yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor. Masalah dan fenomena yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat melalui kerangka pikir berikut

Kerangka Berpikir

**Gambar 1. Kerangka Pikir***Sumber : Diolah Peneliti, 2023*

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang diusung oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) atau hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Menurut Taylor dan Bogdan (dalam Suyatno dan Sutinah, 2011: 166) pengertian metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif mengenai tulisan maupun kata-kata lisan dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang diteliti. Pendekatan ini mengarah pada latar dan individu secara utuh, tidak mengisolasi individu ke dalam variabel, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang sudah ditetapkan bertujuan untuk membatasi objek kajian, agar objek yang dikaji tidak meluas sehingga peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menentukan data-data yang diperlukan. Fokus penelitian berperan penting dalam suatu penelitian, mengingat pentingnya fokus penelitian maka peneliti berfokus pada:

1. Implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling, akan dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn

(1975) dalam Hartawan et al., (2023) yang dikaitkan dengan indikator keberhasilan program yaitu meliputi:

- a. Standar dan sasaran mempunyai indikator kinerja seberapa jauh tujuan dan standar kebijakan tercapai. Standar dan sasaran kebijakan tersebut meliputi apakah sasaran warga binaan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini dapat ditinjau melalui indikator keberhasilan kelembagaan, seperti melalui kegiatan stuktur P3KSS dan pembagian kelompok binaan.
- b. Sumberdaya dipersiapkan untuk dapat memfasilitasi administrasi agar lebih efektif dan efisien dalam implementasi P3KSS. Dalam penelitian ini akan membahas siapa saja implementor yang terlibat dalam implementasi P3KSS, mencari tahu apakah jumlah implementor P3KSS di Kelurahan Sumber Agung sudah mencukupi, dan melihat dari indikator keberhasilan tentang peningkatan keterampilan perempuan dibidang industri kecil, melalui kegiatan pemberian alat-alat pembinaan kelompok usaha dan latihan berbagai jenis keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga. Serta indikator keberhasilan tentang kelembagaan melalui kegiatan penganggaran (bantuan antara pemerintah dan swadaya)
- c. Hubungan antar organisasi dan penguatan aktivitas memberikan syarat bahwa standar dan tujuan program harus dipahami oleh pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antar organisasi berfokus pada konsistensi dan ketepatan komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana, bantuan dalam menafsirkan pedoman dan aturan pejabat yang lebih tinggi, pemahaman program dan tujuan oleh pelaksana, serta dapat memberikan sanksi positif atau negatif. Dalam penelitian ini akan membahas indikator keberhasilan tentang penyuluhan kepada pedagang kecil/ekonomi lemah melalui kegiatan Penataran, sosialisasi dan membina kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Dinas PPPA.

- d. Karakteristik agen pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran staf suatu lembaga, vitalitas organisasi, tingkat kontrol hirarkis keputusan sub-unit dan proses dalam lembaga pelaksana, tingkat komunikasi keterbukaan dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak eksternal serta hubungan formal dan informal dengan pelaksana kebijakan atau pembuat kebijakan. Berkenaan dengan karakteristik badan pelaksana P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, peneliti akan menganalisis sesuai indikator keberhasilan penyuluhan kepada pedagang kecil/ekonomi lemah dengan kegiatan sosialisasi.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi, opini publik yang muncul terkait dengan isu kebijakan, kondisi ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, sikap elite dalam implementasi kebijakan (menentang atau mendukung), dan memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan swasta dalam mendukung atau menentang suatu kebijakan. Dalam penelitian ini akan membahas indikator keberhasilan tentang pemberantasan buta huruf dalam arti luas melalui kegiatan perubahan sikap mental dan indikator keberhasilan peningkatan keterampilan perempuan dibidang industri kecil/industri rumah tangga/kewirausahaan melalui kegiatan latihan berbagai jenis keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga.
- f. Disposisi implementor (sikap pelaksana) yaitu meliputi pemahaman pelaksana terhadap kebijakan P3KSS, arah tanggapan pelaksana (menolak, menerima, atau netral), serta intensitas tanggapan pelaksana. Berkenaan dengan disposisi implementor dalam implementasi P3KSS, peneliti akan menganalisis bagaimana respon implementor terhadap kebijakan P3KSS, dan bagaimana sikap implementor dalam menjalankan tugasnya, serta peneliti akan

menggali informasi apakah terdapat pengawasan terhadap implementor dalam menjalankan tugasnya.

2. Berdasarkan fokus yang telah disebutkan di atas, terdapat satu fokus lagi dimana peneliti mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Definisi data sendiri merupakan sebuah catatan ataupun kumpulan suatu fakta, yang mana fakta tersebut merupakan hasil dari pengamatan yang dapat berbentuk angka, kata-kata maupun lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli atau secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Data primer didapat dari suatu proses pengumpulan data melalui metode wawancara maupun hasil observasi dari narasumber (Nugrahani, 2014).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat secara tidak langsung atau dalam kata lain data yang bukan bersumber langsung dari lapangan melainkan dari data yang sudah diolah oleh orang lain yang didapat dari buku, statistik maupun dokumen. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data tambahan untuk memenuhi kebutuhan peneliti. Data sekunder ini pada umumnya berupa dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan implementasi program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, seperti laporan kegiatan P3KK, petunjuk teknis pelaksanaan dan lainnya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan dan lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Cara terbaik yang perlu dilakukan ketika penentuan lapangan penelitian yaitu dengan mempertimbangkan antara teori substantif namun dengan terus mempelajari serta mendalami fokus maupun rumusan masalah penelitian, sehingga dapat dilihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, maka peneliti pun harus melakukan turun lapangan. (Moleong, 2017).

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Karena sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G/147/IV.09/HK/2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) provinsi Lampung tahun 2020 sampai dengan 2025. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam sebuah penelitian karena pada dasarnya dilakukannya sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang benar, akurat sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data. Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pun hanya dapat bekerja berdasarkan data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses

pelaksanaan implementasi program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung atau *face to face* dengan responden sehingga peneliti dapat memperoleh data secara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan atau responden yang dianggap mampu dalam menjawab permasalahan penelitian yakni yang berkaitan dengan proses pelaksanaan implementasi program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Informan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Tempat/Instansi	
1	Noviana Rahmayati	Kabid KHP & KK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	
2	Saraswati	Koordinator P3KSS Kecamatan Kemiling	Kecamatan Kemiling	
3	Satria Dinata	Koordinator P3KSS Kelurahan Sumber Agung	Kelurahan Sumber Agung	
4	Irma	Ketua Tim PKK	Kelurahan Sumber Agung	
5	Jamila	Ketua Pokja	Kelurahan Sumber Agung	
6	Mutia	Warga Binaan	Kelurahan Sumber Agung	
7	Nur	Warga Binaan	Kelurahan Sumber Agung	
8	Juariyah	Warga Binaan	Kelurahan Sumber Agung	
9	Riska	Warga Binaan	Kelurahan Sumber Agung	

10	Eli	Warga Binaan	Agung Kelurahan Agung	Sumber
----	-----	--------------	-----------------------------	--------

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni sebuah data berupa sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis seperti surat-menyurat, notulensi rapat, berita acara serta dokumen yang berupa arsip maupun gambar yang berkaitan dengan proses pelaksanaan implementasi program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Dokumentasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5. Dokumentasi

No	Nama Dokumen
1	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi program P3KSS
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI NO. 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan program peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera di daerah
3	Surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G/147/IV.09/HK/2020 tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) provinsi Lampung tahun 2020 sampai dengan 2025
4	Laporan Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)
5	Petunjuk Teknis Penilaian Keberhasilan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)

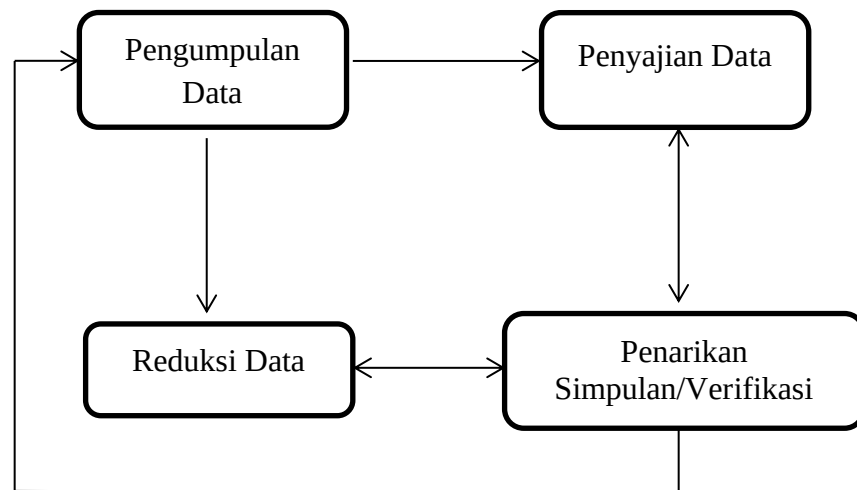
Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model Miles, Huberman dan Saldana (2014). Dimana teknik analisis data tersebut dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data ini akan menggunakan salah satu model yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu model

interaktif, dimana reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian masuk dalam proses penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014).

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Komponen Analisis Data.

Model oleh Miles, Huberman & Saldana (2014)

Sumber: Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014)

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Pada tahap pertama ini peneliti akan melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat adalah data yang valid.

b) Reduksi Data

Reduksi data diartikan juga sebagai merangkum, memilih bagian penting untuk mencari tema bahasan dan membuang yang tidak penting untuk diambil. Data yang telah direduksi dapat mempermudah peneliti menemukan poin penting dan lebih mudah memahami hasil penelitian dan tentunya akan mempermudah proses analisis data.

c) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi berbentuk teks naratif, bagan, foto maupun yang sejenisnya untuk memberikan gambaran terhadap data keseluruhan atau data maupun bagian tertentu dalam penelitian, hal ini berguna untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran umum data dalam penelitian sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data akan memberikan batasan yang memungkinkan melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

d) Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dalam tahap analisis data penelitian kualitatif langkah selanjutnya adalah penerikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah namun bisa juga tidak karena kesimpulan awal akan berubah seiring dengan bukti atau temuan-temuan yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Penarikan simpulan akan terus dilakukan dari sejak pertama penelitian di lapangan, selama proses tersebut peneliti harus dapat memahami pola yang terjadi, hubungan persamaan, maupun hal yang sering terjadi untuk dituangkan dalam kesimpulan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk mengukur ketepatan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data objek penelitian yang terjadi dilapangan. Jika penelitian bertujuan untuk mendapatkan data valid maka data yang disajikan harus memiliki kesamaan dengan yang terjadi dilapangan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini berdasarkan Abdussamad (2021) yaitu teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 4 indikator yaitu dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility* (Uji Kredibilitas)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan pada data dari hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

- a. Meningkatkan ketekunan diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan,
- b. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik, yaitu pengecekan data dengan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama sehingga didapatkan data yang valid (Sugiyono, 2013).

2. *Tranferability*

Penggunaan *transferability* memungkinkan pembaca untuk memahami temuan penelitian, sehingga penting bagi peneliti untuk memberikan deskripsi atau penjelasan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat diandalkan ketika membuat laporan.

3. *Dependability*

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, artinya apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dalam penelitian kualitatif biasanya melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Cara yang dilakukan yaitu oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability*

Confirmability pada penelitian kualitatif disebut juga dengan objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *confirmability* juga berarti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan, jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi program peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS) di kelurahan sumber agung kecamatan kemiling,

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi P3KSS dalam di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling, dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Hartawan et al., (2023) yang dikaitkan dengan indikator keberhasilan program yaitu meliputi:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, pada standar dan sasaran dalam implementasi P3KSS di Kelurahan Sumber Agung sudah terdapat standar yang diatur dalam pedoman pelaksanaan P3KSS. Implementor sudah mengetahui standar pelaksanaan P3KSS.
- 2) Sumber daya, pada sumber daya dapat ditinjau dengan indikator keberhasilan program, dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi P3KSS di Kelurahan Sumber Agung sumber daya manusia sudah cukup baik namun untuk sumber daya finansial, khususnya pada indikator keberhasilan tentang peningkatan keterampilan perempuan dibidang industri kecil, melalui kegiatan pemberian alat-alat pembinaan kelompok usaha terdapat kekurangan.
- 3) Hubungan antar organisasi, pada hubungan antar organisasi maka dapat disimpulkan bahwa implementor P3KSS, sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas PPPA.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, pada karakteristik agen pelaksana dalam Implementasi P3KSS di Kelurahan Sumber Agung sudah

sesuai dengan indikator keberhasilan program, dalam petunjuk teknis pelaksanaan P3KSS.

- 5) Indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi, pada indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam implementasi P3KSS dapat mengubah pola perilaku perempuan khususnya yang menjadi warga binaan. P3KSS dapat mengubah kondisi sosial dan ekonomi menjadi lebih baik lagi karena dalam P3KSS terdapat kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, dalam pembinaan tersebut diberikan materi tentang pentingnya pendidikan, tentang peningkatan ekonomi dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya tidak ditemui adanya kepentingan politik yang dimanfaatkan.
- 6) Disposisi implementor, pada disposisi implementor dalam implementasi P3KSS di Kelurahan Sumber Agung, sudah berjalan dengan cukup baik. Implementor P3KSS sudah memahami isi program tersebut dengan mempelajari petunjuk teknis dan indikator pelaksanaan P3KSS yang telah diberikan..

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling

Faktor pendukungnya yaitu dari program P3KSS terhadap peningkatan peran perempuan dapat dilihat dari tingkat kualitas, pemenuhan dan partisipasi di bidang ekonomi yang semakin meningkat dan adanya kemudahan dalam mencari mata pencaharian serta seluruh pemerintah daerah maupun masyarakat mendukung dalam seluruh kegiatan P3KSS. Selain itu mulai munculnya kesadaran dari warga binaan khususnya para perempuan yang menjadi kepala keluarga untuk dapat merubah pola pikirnya.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya finansial dalam proses pelaksanaan program P3KSS di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling.
- b. Kurangnya komunikasi antar pendamping warga binaan dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Studi di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling” maka peneliti memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki proses implementasi P3KSS di Kelurahan Sumber Agung. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya dukungan sumber daya finansial untuk implementor P3KSS. Dukungan tersebut yaitu berbentuk fasilitas seperti laptop, proyektor, ATK, pengeras suara, dll. Dengan adanya fasilitas yang lengkap maka dapat memudahkan implementor dalam proses implementasi P3KSS.
- 2) Perlu adanya evaluasi rutin yang dilakukan oleh Dinas PPPA Bandar Lampung terkait dengan kinerja Tim PKK yang ada di Kelurahan Sumber Agung, sehingga dapat meminimalisir kejadian jarang dilakukannya kegiatan pendampingan sosialisasi.
- 3) Membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat Kelurahan Sumber Agung yang dominan tempat tinggal mereka terdapat tempat wisata supaya dipemberdayakan masyarakat sekitar terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Andi Cudai Nur dan M. Guntur. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, hlm. 3
- Adrian, M. R., Kutandi, C., & Pramukty, R. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi: Sumber Daya Manusia, Bisnis, Teknologi. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 126–133.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159.
- Arifin, N. (2013). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jepara: Unisnu Press.
- ARTANTYA, P. (2014). *Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Induk Majenang di desa Sindangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO).
- Aviandani, K., Cikusin, Y., & Sunariyanto. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 43–52.
- Azizah, N. (2021). *Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary* (Edisi 9). Minnesota: West Publishing, hlm. 1348.

- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Jurnal Professional (Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik)*, 9(1), 109–116
- Fitri Meutia, I., & Atika, D. (2012). IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN TRAFFICKING BERBASIS PENGOLAHAN DATA PADA KOORDINASI GUGUS TUGAS
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Handyaningrat, S. (1982). ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL. Jakarta : PT Gunung Agung
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Cetakan 1, Issue April). Pustaka Ilmu
- Hartawan, R. C., Kosasih, F., & Rochmani. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Hermanto Suaib, dkk. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. Makassar: Humanities Genius, hlm. 7-8.
- Ibrahim, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. MADANI: *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 113–137. <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-092006103006-57.pdf>
- Ihsan, M. A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 14-33.

- Karyaningsih, P. D. (2018). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Lasmi, A., Bayhaqi, H., Negeri, I., & Utara, S. (2022). Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting. 2, 35–45. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v2i1.509>
- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik. In *Gastronomía ecuatoriana yturismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Calina Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook Amerika*. Los Angeles: Sage Publications.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)* (Cetakan Pe, Vol. 1). LeutikaPrio.
- Nuraini, Z. (2017). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSID).
- Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (Cetakan XI). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA cv.

Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D. B., & Choirunisa, N. (2020). Dinamika Aktor dalam Perumusan Kebijakan Desa Layak Anak. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(1), 26–35.

Fatmala, P. A. (2019). Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sangiang Jaya Kota Tangerang (Studi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten).

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera di daerah

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi program P3KSS

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga

Surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G/147/IV.09/HK/2020, tanggal 26 Februari 2022, tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) provinsi Lampung tahun 2020 sampai dengan 2025